

Analisis Pengelolaan Aset, Pengawasan Internal, dan Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan melalui Akurasi BMD pada DKPPP Kota Tangerang Selatan

Rospita Clariyani S^{1*}, Masno Marjohan², Sahroni³

Magister Manajemen (231015250177), Universitas Pamulang
clariyanirose2@gmail.com^{1*}, dosen00124@unpam.ac.id², dosen001420@unpam.ac.id³

Received 15 Februari 2026 | Revised 06 Maret 2026 | Accepted 11 Maret 2026

*Korespondensi Penulis

Abstract

Accurate management of local government assets (Barang Milik Daerah/BMD) is essential for ensuring accountability and improving public financial performance. However, inconsistencies in asset records, weak internal controls, and unintegrated budget planning often reduce the reliability of financial reports. This study aims to examine the effects of asset management, internal control, and budget planning on financial performance through the accuracy of BMD data at the Department of Food Security, Agriculture, and Fisheries of South Tangerang City. A quantitative approach was employed using a survey of 105 employees involved in asset administration and financial reporting, and the data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The findings indicate that internal control significantly influences BMD data accuracy, while asset management and budget planning show no significant direct effects. BMD data accuracy has a positive and significant impact on financial performance and serves as a partial mediator. The model explains 51.2% of the variance in financial performance. This study contributes empirical evidence that strengthening internal control systems and digitalizing asset administration are critical strategies for improving asset data reliability and enhancing the quality of local government financial reporting.

Keywords: Asset Management; Internal Control; Budget Planning; Asset Data Accuracy; Financial Performance.

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, ketidaksesuaian pencatatan aset, lemahnya pengawasan internal, dan perencanaan anggaran yang belum terintegrasi masih menjadi penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengelolaan aset, pengawasan internal, dan perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan melalui akurasi data BMD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 105 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset dan pelaporan keuangan, kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap akurasi data BMD, sedangkan pengelolaan aset dan perencanaan anggaran belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Akurasi data BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan serta berperan sebagai mediator parsial. Model mampu menjelaskan 51,2% variasi kinerja keuangan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan bukti empiris bahwa penguatan sistem pengendalian internal dan digitalisasi pengelolaan aset menjadi strategi kunci dalam meningkatkan keandalan data aset serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset; Pengawasan Internal; Perencanaan Anggaran; Akurasi BMD; Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien. Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari kekayaan daerah memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakakuratan data aset, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil aset.

Permasalahan akurasi data BMD sering menimbulkan temuan audit, inefisiensi penggunaan anggaran, serta menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik aset, tetapi juga oleh kualitas sistem administrasi, pengendalian internal, dan konsistensi perencanaan anggaran. Oleh karena itu, integrasi antara pengelolaan aset, pengawasan internal, dan perencanaan anggaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Fenomena tersebut juga terlihat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Data periode 2020–2024 menunjukkan adanya perbaikan tata kelola aset yang ditandai dengan menurunnya ketidaksesuaian data aset dan meningkatnya akurasi data BMD. Penguatan pengawasan internal turut menurunkan temuan audit, sementara realisasi anggaran relatif stabil pada tingkat tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kondisi fisik aset dan data administrasi yang memerlukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan melalui kualitas pengelolaan aset.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada Resource-Based View yang memandang aset sebagai sumber daya strategis organisasi, Stewardship Theory yang menekankan tanggung jawab aparatur dalam pengelolaan sumber daya publik, serta kerangka pengendalian internal COSO yang diadaptasi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ketiga perspektif tersebut menegaskan bahwa pengelolaan aset yang efektif memerlukan dukungan pengawasan internal dan perencanaan

anggaran yang terintegrasi agar mampu menghasilkan kinerja keuangan yang optimal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengendalian internal dan pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, kajian yang menguji secara terintegrasi peran akurasi data BMD sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengelolaan aset, pengawasan internal, perencanaan anggaran, dan kinerja keuangan masih terbatas, khususnya pada level organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan aset, pengawasan internal, dan perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah dengan mempertimbangkan peran mediasi akurasi data BMD.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pengelolaan aset, pengawasan internal, dan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akurasi data BMD dan kinerja keuangan, serta akurasi data BMD berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian tata kelola aset publik serta rekomendasi praktis bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, kualitas pengelolaan aset publik juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sistem informasi keuangan dengan sistem pengelolaan aset. Pendekatan berbasis sistem informasi menekankan bahwa akurasi data tidak hanya merupakan hasil dari prosedur administrasi, tetapi juga dari efektivitas teknologi informasi yang mendukung proses pencatatan, pengendalian, dan pelaporan aset daerah. Integrasi sistem informasi keuangan daerah dengan sistem pengelolaan aset dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses rekonsiliasi data, serta meminimalkan kesalahan pencatatan aset.

Dalam perspektif tata kelola publik modern, akuntabilitas pengelolaan aset daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data BMD menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pengawasan internal yang efektif serta sistem pengelolaan data aset yang terintegrasi

merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengaruh pengelolaan aset, pengawasan internal, dan perencanaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagian besar studi masih menempatkan variabel-variabel tersebut secara langsung terhadap kinerja keuangan tanpa mempertimbangkan peran akurasi data Barang Milik Daerah (BMD) sebagai mekanisme mediasi. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada level pemerintah daerah secara agregat, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika tata kelola aset pada level organisasi perangkat daerah yang memiliki karakteristik operasional lebih spesifik. Studi terbaru juga menekankan bahwa digitalisasi administrasi aset dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan sektor publik (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024). Namun, bukti empiris yang menguji integrasi ketiga faktor tersebut melalui akurasi BMD sebagai variabel intervening masih terbatas, khususnya pada instansi teknis seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model struktural berbasis Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme peningkatan kinerja keuangan melalui penguatan tata kelola aset dan kualitas data BMD.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel secara simultan. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Metode ini dipilih karena mampu mengakomodasi model penelitian yang kompleks dengan beberapa konstruk laten dan indikator, tidak mensyaratkan asumsi normalitas data, serta tetap memberikan estimasi yang stabil pada ukuran sampel relatif kecil. Selain itu, PLS-SEM berorientasi pada kemampuan prediktif (predictive-oriented) dan efektif digunakan untuk menguji hubungan kausal sekaligus peran mediasi antarvariabel, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian dalam menganalisis pengaruh pengelolaan aset, pengawasan internal, dan perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan melalui akurasi Barang Milik Daerah (BMD) sebagai variabel mediator. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan yang terlibat dalam pengelolaan aset, pengawasan internal, perencanaan anggaran, dan pelaporan keuangan, berjumlah 105 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan responden penelitian. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100 persen.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian terdiri atas 41 item pertanyaan yang disusun berdasarkan teori dan regulasi terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Utama	Sumber	Skala
Pengelolaan Aset (X_1)	Pengelolaan BMD secara tertib mulai dari perencanaan hingga penghapusan	Inventarisasi & pencatatan, legalitas/sertifikasi, digitalisasi data, pemanfaatan & pemeliharaan, pengamanan/penghapusan	Permendagri 47/2021; Mardiasmo (2022); Aprilia et al. (2025)	Likert 1–5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Utama	Sumber	Skala
Pengawasan Internal (X ₂)	Sistem pengendalian untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan	Audit internal, monitoring & pengendalian risiko, tindak lanjut temuan, sistem pelaporan & transparansi	Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013); Permendagri 77/2020	Likert 1–5
Perencanaan Anggaran (X ₃)	Penyusunan dan alokasi anggaran berbasis kebutuhan riil dan kinerja	ketepatan perencanaan, kesesuaian alokasi, sinkronisasi dokumen, realisasi & evaluasi anggaran	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri 15/2024); Mardiasmo (2022)	Likert 1–5
Akurasi Data BMD (Z)	Tingkat kesesuaian data administratif dengan kondisi fisik aset	ketepatan data, kelengkapan dokumen, digitalisasi & integrasi sistem, pembaruan/validasi berkala	Permendagri 19/2016; Ghazali (2021)	Likert 1–5
Kinerja Keuangan (Y)	Efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	kepatuhan SAP, ketepatan pelaporan, efisiensi anggaran, transparansi & akuntabilitas	Permendagri 7/2020; Marjohan (2021)	Likert 1–5

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

Uji kualitas instrumen dilakukan melalui pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk. Validitas konvergen dinilai melalui nilai outer loading di atas 0,70 dan Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50. Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria Fornell–Larcker dan rasio Heterotrait–Monotrait (HTMT) dengan nilai di bawah 0,85. Reliabilitas konstruk dinilai melalui nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha yang harus melebihi 0,70.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan PLS-SEM dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Evaluasi outer model meliputi pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan konsistensi internal konstruk. Evaluasi inner model meliputi pengujian koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (f^2), relevansi prediktif (Q^2), serta pengujian signifikansi jalur hubungan antarvariabel.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan 5.000 sampel ulang. Hubungan antarvariabel dinyatakan signifikan apabila nilai t-statistik melebihi 1,96 dan nilai p lebih kecil dari 0,05.

Penelitian ini juga melakukan pengujian kualitas model secara menyeluruh dengan menilai nilai Goodness of Fit model PLS melalui indikator Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) serta evaluasi multikolinearitas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan layak

apabila nilai SRMR berada di bawah 0,08 dan nilai VIF di bawah 5. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun memiliki tingkat kecocokan yang memadai serta tidak terjadi bias akibat hubungan antarvariabel independen.

Pengujian mediasi dilakukan dengan menilai signifikansi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, serta jalur hubungan antara variabel independen, mediator, dan dependen menggunakan bootstrapping. Efek mediasi dinyatakan terjadi apabila pengaruh tidak langsung signifikan secara statistik.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Model penelitian mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan sebesar $R^2 = 0,512$ yang menunjukkan kemampuan prediktif model berada pada kategori moderat. Selain nilai koefisien determinasi, evaluasi model struktural juga menunjukkan nilai relevansi prediktif (Q^2) sebesar 0,38 yang berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang memadai terhadap variabel endogen. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi variabel pengelolaan aset, pengawasan internal, dan perencanaan anggaran mampu menjelaskan perubahan kinerja keuangan melalui akurasi data BMD secara substansial. Dengan demikian, model yang dibangun tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki kekuatan

prediktif yang relevan dalam menjelaskan fenomena pengelolaan keuangan daerah.

Nilai R^2 sebesar 0,512 menunjukkan bahwa 51,2% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh pengelolaan aset, pengawasan internal, perencanaan anggaran, dan akurasi data BMD. Nilai ini termasuk kategori moderat, yang mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik dalam menjelaskan kinerja keuangan pada level organisasi perangkat daerah. Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola aset dan efektivitas pengendalian internal merupakan faktor dominan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan. Sementara itu, 48,8% variasi lainnya kemungkinan dipengaruhi faktor di luar model seperti kompetensi SDM, dukungan teknologi informasi, serta komitmen manajerial.

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
S3	1	0.95
S2	10	9.52
S1	79	75.24
SLTA	15	14.29

Sumber: Pengolahan data (2025)

Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir S1 sebesar 75.24 persen, yang

menunjukkan tingkat kapasitas akademik yang memadai dalam memahami pengelolaan aset dan pelaporan keuangan. Selain itu, sebagian besar responden memiliki masa kerja antara 10 hingga 15 tahun, mencerminkan pengalaman kerja yang relatif matang dalam bidang administrasi pemerintahan.

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
<5 tahun	22	20.95
5-10 tahun	10	9.52
10-15 tahun	45	42.86
≥15 tahun	28	26.67

Sumber : Pengolahan data (2025)

Kelompok dominan 10-15 tahun (42,86%) mencerminkan pengalaman kerja matang.

Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap akurasi data BMD, sedangkan pengelolaan aset dan perencanaan anggaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel tersebut. Akurasi data BMD terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan serta memediasi pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	β	t-value	p-value	Status
H1	$X1 \rightarrow Z$	0.21	1.45	>0.05	Ditolak
H2	$X2 \rightarrow Z$	0.38	3.87	<0.01	Diterima
H3	$X3 \rightarrow Z$	0.15	1.23	>0.05	Ditolak
H4	$Z \rightarrow Y$	0.42	4.12	<0.01	Diterima
Mediasi H2-Y	$X2 \rightarrow Z \rightarrow Y$	0.16	2.98	<0.05	Signifikan

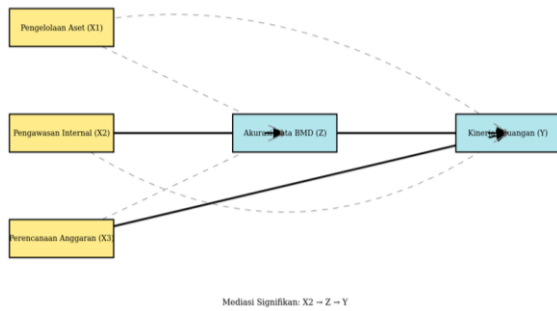
Sumber : Pengolahan data (2025)

Berdasarkan Tabel 4, koefisien jalur pengelolaan aset ($\beta = 0,21$; $p > 0,05$) dan perencanaan anggaran ($\beta = 0,15$; $p > 0,05$) tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut belum memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan akurasi data BMD.

Sebaliknya, pengawasan internal menunjukkan koefisien terbesar dan signifikan ($\beta = 0,38$; $p < 0,01$), yang menandakan bahwa fungsi monitoring, audit internal, dan tindak lanjut pengendalian memiliki peran dominan dalam meningkatkan keandalan data aset. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengendalian lebih menentukan kualitas

informasi dibandingkan aspek administratif semata.

Selanjutnya, akurasi data BMD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ($\beta = 0,42$; $p < 0,01$), yang menunjukkan bahwa data aset yang valid, mutakhir, dan andal menjadi fondasi utama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1: Path Analysis Model Penelitian
Sumber : Pengolahan data (2025)

Selain itu, hasil pengujian efek tidak langsung menunjukkan bahwa akurasi data BMD secara signifikan memediasi hubungan antara pengawasan internal dan kinerja keuangan. Karena pengaruh langsung pengawasan internal terhadap kinerja keuangan tetap signifikan bersamaan dengan pengaruh tidak langsung melalui akurasi data BMD, maka jenis mediasi yang terjadi dikategorikan sebagai mediasi parsial (partial mediation). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal tidak hanya berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas dan keandalan data aset. Dengan demikian, akurasi data BMD berperan sebagai mekanisme perantara yang memperkuat efektivitas pengawasan internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan akurasi data Barang Milik Daerah (BMD). Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan penting dalam memastikan keandalan pencatatan aset, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mendeteksi ketidaksesuaian data secara dini. Penguatan fungsi monitoring, audit internal, dan tindak lanjut temuan mendorong terciptanya proses verifikasi yang lebih sistematis sehingga kualitas informasi aset menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif Resource-Based View (RBV), pengawasan internal dapat dipandang sebagai kapabilitas strategis organisasi yang memberikan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya publik. Konsep ini, sebagaimana dikemukakan oleh Jay Barney (1991), menekankan bahwa kapabilitas internal yang

bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan menjadi sumber keunggulan yang berkelanjutan. Dalam konteks sektor publik, sistem pengendalian internal tidak hanya merepresentasikan prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan kompetensi institusional dalam mengelola risiko, menjaga integritas data, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi perangkat daerah yang memiliki sistem pengendalian internal yang efektif cenderung mampu menghasilkan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta kinerja keuangan secara berkelanjutan dibandingkan organisasi dengan tata kelola yang lemah.

Sebaliknya, pengelolaan aset dan perencanaan anggaran tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap akurasi data BMD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan prosedur formal dan alokasi anggaran saja belum cukup untuk menjamin kualitas data apabila belum didukung integrasi sistem informasi serta pengendalian yang konsisten. Dengan kata lain, aktivitas pengelolaan yang bersifat administratif belum otomatis menghasilkan data yang valid tanpa mekanisme verifikasi dan pengawasan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola lebih menentukan dibanding sekadar ketersediaan sumber daya.

Lebih lanjut, akurasi data BMD terbukti berperan sebagai mediator antara pengawasan internal dan kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pengendalian internal terhadap kinerja keuangan terjadi melalui peningkatan kualitas informasi aset. Data yang akurat memungkinkan proses pelaporan, rekonsiliasi, dan pengambilan keputusan fiskal dilakukan secara lebih transparan dan tepat waktu. Dengan demikian, akurasi data menjadi jembatan yang menghubungkan praktik pengendalian dengan capaian kinerja organisasi.

Temuan ini juga mengindikasikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola aset. Integrasi sistem digital, seperti e-BMD dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, memungkinkan proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan dilakukan secara real time sehingga mengurangi potensi kesalahan manual. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik melalui transparansi data.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa reformasi pengelolaan aset

daerah sebaiknya difokuskan pada penguatan fungsi pengendalian internal dan integrasi sistem informasi, bukan semata pada penambahan aset atau peningkatan alokasi anggaran. Dari sisi manajerial, organisasi perangkat daerah perlu membangun budaya kepatuhan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi agar pengelolaan aset dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan internal berperan paling dominan dalam meningkatkan akurasi data Barang Milik Daerah (BMD) dan kinerja keuangan daerah. Pengawasan internal yang efektif mampu memperbaiki kualitas pencatatan aset serta meningkatkan kinerja keuangan secara tidak langsung melalui peningkatan akurasi data BMD sebagai variabel mediasi. Sebaliknya, pengelolaan aset dan perencanaan anggaran belum menunjukkan pengaruh langsung terhadap akurasi data, yang menandakan bahwa prosedur administratif dan alokasi anggaran saja belum cukup tanpa dukungan pengendalian yang kuat.

Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola dan kapabilitas pengendalian internal merupakan faktor strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Secara praktis, implikasi kebijakan yang direkomendasikan bagi instansi pemerintah meliputi: (1) penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis digital, (2) integrasi sistem e-BMD dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk sinkronisasi data aset dan keuangan secara real time, (3) peningkatan kompetensi aparatur dalam penatausahaan aset, serta (4) penguatan monitoring dan tindak lanjut temuan audit secara berkala. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, transparansi laporan keuangan, serta meminimalkan temuan pemeriksaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah dan menggunakan data persepsi responden, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek pada beberapa pemerintah daerah, memanfaatkan data sekunder laporan keuangan, serta menambahkan variabel seperti kualitas sistem informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya

organisasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. E., Utami, N., & Hidayat, R. (2023). Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan pengawasan dan pengendalian sebagai variabel mediasi pada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 359–369. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1438>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- Dharma, F., Dewi, A. S., & Nugroho, A. (2023). Factors affecting quality of accounting information and its impact on local government fixed assets management effectiveness. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 26(1), 49–84. <https://doi.org/10.33312/ijar.636>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Islami, A. N., Furqan, A. C., & Kamase, H. P. (2025). Risk management and government internal control system (SPIP) on local government financial performance. *Amkop Management Accounting Review*, 5(2), 1442–1456. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.3352>
- Mahayuddin, M., & Fatimah, J. M. (2022). Efektivitas sistem informasi manajemen daerah (SIMDA-BMD) dalam mendukung inventarisasi aset daerah di Kabupaten Majene. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 150–164. <https://doi.org/10.24198/jane.v9i2.41311>
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Paulus, A. Y., Kafiari, F., & Bame, D. (2025). Analisis inventarisasi dan penilaian barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada BPPKAD Provinsi

- Papua Tengah. *Jurnal MEBI*, 4(2), 1–12.
<https://doi.org/10.8844/a9cg9k41>
- Purnamasari, R., Fitriano, Y., & Astuty, K. (2025). The influence of budget planning, regional financial information systems, and government accounting standards on the quality of local government financial reports. *Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, dan Manajemen*, 2(1), 7–16.
<https://doi.org/10.70963/jeiam.v2i1.415>
- Sumaryana, A., Rahayu, D., & Rahman, T. (2024). Rethinking local government asset management in Indonesia: Governance, planning, and policy evaluation. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(2), 217–232.
<https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i2.643>
- Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis pengelolaan barang milik daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 124–140.
<https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662>